

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Keterbukaan Massa Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

Influence of Corporate Governance, Size of Company, and Media Exposure to Environmental Disclosure

Galuh Kirana Nugraheni¹ Shinta Widyastuti² Rahmasari Fahria³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 21 February 2021

Revised 20 June 2021

Publish 30 June 2021

Keywords:

Audit committees, board of director, environmental disclosure, media exposure, size of company.

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10029>

ABSTRACT

Government has regulated obligation for company to disclose about environment's conditions around company in law of limited company. Environmental disclosure is a company's responsibility to provide information about what it has done to maintain the environment as a result company's operation activities. Eventhough government has regulated about environmental disclosure, there are some companies have not done their responsibility. This research's aims are to analyze good corporate governance (GCG), size of company, and media exposure to environmental disclosure. This research is quantitative method and use secondary data of mining sector that obtained from Indonesia Stock Exchange's website and company's official website from 2015-2019. Sampling's method use purposive sampling method. The hypothesis test use multiple linear regression. The Results are size of audit committees has positive significant influence to environmental disclosure, while size of the board of commissioners, size of company, and media exposure do not have positive significant influence to environmental disclosure.

ABSTRAK

Pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan yang terjadi disekitar perusahaan melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengungkapan Informasi Lingkungan atau Environmental Disclosure ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menginformasikan apa yang telah dilakukan perusahaan guna menjaga lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Walaupun pengungkapan informasi lingkungan telah diatur Undang-Undang, tetapi masih ada perusahaan yang melalaikannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh good corporate covernance (GCG), ukuran perusahaan (firm size), dan keterbukaan massa terhadap pengungkapan informasi lingkungan (Media Exposure to Environmental Disclosure). Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan sektor pertambangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan selama 2015-2019. Metode sampling pada penelitian menggunakan metode purposive sampling, dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan keterbukaan massa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik yang ada di daratan, lautan, dan terutama yang berada dibawah bumi (Kurniawan, 2019). Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan baik BUMN, Swasta, dan Asing untuk berinvestasi pada sektor pertambangan di Indonesia. Dampak dari sektor pertambangan ini selain meningkatkan sumber pendapatan bagi negara, juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Proses penambangan dan lokasi penambangan yang tak jarang berada dekat dengan pemukiman masyarakat akan menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. Jika sisa galian tambang tidak direvitalisasi maka bisa dipastikan sumber-sumber kehidupan masyarakat akan terganggu.

Permasalahan lingkungan akibat sektor pertambangan di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi dan sangat mengkhawatirkan. Sekitar 1.700-an bekas galian tambang yang memiliki izin di Kalimantan Timur ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tambangnya (theconversation.com, 2020). Daerah aliran sungai di bengkulu tercemar limbah batu bara sejak tahun 1980-an, kegiatan penambangan PT Lapindo Brantas yang menyebabkan keluarnya lumpur yang menenggelamkan ratusan rumah masyarakat, penambangan emas PT Freeport menyebabkan munculnya lubang yang sangat besar dan rusaknya tanah di lokasi penambangan, dan PT Rayon Utama yang menghasilkan gas polusi berbahaya yang berasal dari kegiatan operasional penambangannya.

Menindaklanjuti maraknya dampak buruk lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu UU Nomor. 40 Tahun 2007. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang kegiatan operasionalnya berhubungan dengan sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Pemerintah juga mengharuskan Perseroan Terbatas untuk menyampaikan laporan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Pengungkapan Informasi Lingkungan atau *environmental disclosure* oleh perusahaan akan mempermudah masyarakat, *stakeholder*, dan pemangku kepentingan untuk mengawasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan. Perusahaan yang memberikan informasi mengenai aspek sosial pada khalayak umum menunjukkan orientasi perusahaan kepada konsumennya, sehingga penilaian terhadap perusahaan akan baik dan akan meningkatkan penjualannya (Cowen et al., 1987). Pengungkapan infoemasi lingkungan juga mendukung program-program yang dilakukan Pemerintah, seperti sistem manajemen lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan atau yang dikenal dengan singkatan PROPER, yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Kurniawan, 2019). Kurangnya pengawasan dari lembaga terkait dalam pelaksanaan AMDAL dan pelaporan mengenai pengungkapan informasi lingkungan yang bersifat sukarela (*voluntary*) menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara sosial kepada masyarakat dan tidak disusunnya laporan pengungkapan dampak lingkungan.

Selain Pemerintah yang berperan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, para petinggi pada perusahaan itu sendiri juga memiliki peran yang penting. Dorongan dari para petinggi perusahaan melalui implementasi *good corporate covernance* (GCG) atau tata kelola yang baik membuat manajemen perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan taggungjawab sosial dan lingkungannya. Variabel yang digunakan untuk mewakili *good corporate governance* dalam penelitian ini yaitu, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggrarini & Taufiq (2017), dimana variabel yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian Anggrarini & Taufiq (2017) adalah variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Mutia et al., (2018) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri Kehati. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Pakpahan & Rajagukguk (2018) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan keterbukaan massa. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan keterbukaan massa berpengaruh terhadap

environmental disclosure, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Solikhah & Winarsih (2016) menggunakan variabel liputan media, dan sampel yang digunakan adalah data perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan liputan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan fenomena terkait dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan yang terjadi sampai saat ini, mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali terkait Pengungkapan Informasi Lingkungan atau *environmental disclosure*. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, keterbukaan massa, dan menambahkan variabel ukuran komite audit yang belum diteliti pada penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkhusus sektor pertambangan dan mempublikasikan *annual report* pada periode 2015-2019 secara berturut-turut dan mempublikasikan *sustainability report* pada periode 2015-2019.

2. TELAAH LITERATUR

Dowling (1975) mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan teori legitimasi. Dasar pemikiran dari teori ini adalah adanya ikatan sosial atau kontrak tidak langsung antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya (Ahmad & Sulaiman, 2004). Secara tersirat masyarakat memiliki suatu harapan bahwa perusahaan akan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sebaik mungkin dan tidak merugikan masyarakat (Rokhlinasari, 2015). Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional dengan ramah lingkungan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, atau memberi perhatian terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan secara tidak langsung.

Pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* merupakan penerapan teori legitimasi (Rokhlinasari, 2015). Melalui laporan tersebut perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga lingkungan sekitar sehingga dapat membantu dan diterima oleh masyarakat (Brown & Deegan, 1998). Pengungkapan informasi lingkungan juga memberikan dampak positif bagi investor karena memberikan keyakinan bahwa tidak akan ada pengeluaran yang besar terkait perbaikan lingkungan atau ancaman terkait keberlangsungan hidup perusahaan akibat penolakan masyarakat sekitar.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan kontrak *principal* atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang merupakan agen dari *principal*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen serta Meckling (1976). Pemilik perusahaan menempatkan manajemen sebagai perpanjangan tangannya untuk menjalankan perusahaan agar menghasilkan laba sebesar-besarnya. Jika tujuan antara pemegang saham dan manajemen sejalan, yaitu untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan maka Pengungkapan Informasi Lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dilaksanakan oleh manajemen. Pemegang saham dan agen seharusnya memiliki informasi yang simetris terkait apa yang terjadi di dalam perusahaan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Manajemen sebagai agen lebih memiliki informasi lengkap tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula biaya keagenan yang dibutuhkan (Sparta & Rheadanti, 2019).

Suatu perusahaan bukan hanya sebagai entitas yang mementingkan keuntungan pribadi atau manajemen tapi juga keuntungan seluruh *stakeholder* (Sari et al., 2019), sehingga masukan *stakeholder* perlu menjadi pertimbangan dalam menjalankan perusahaan. Hal ini merupakan pendekatan dari teori *stakeholder* yang dikemukakan pertama kali Tahun 1963 dalam buku Richard Freeman. Melalui pengungkapan dampak lingkungan, komunikasi yang kuat kepada *stakeholder* dapat terlaksana.

Aktivitas manajemen perusahaan sebagai agen diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan komisaris akan bertanggung jawab untuk mengontrol kegiatan-kegiatan manajemen (Dharmawan & Suhardianto, 2016), yaitu dalam menjalankan operasional perusahaan, laporan keuangan yang disusun, termasuk laporan pertanggungjawaban sosial. Ukuran dewan komisaris yang besar akan relatif baik dalam mengontrol manajemen untuk melakukan pengungkapan dampak lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggrarini & Taufiq, 2017; Suprpti et al., 2019; Wardani & Haryani, 2018). Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan dampak lingkungan

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris. Komite audit dapat dikatakan sebagai *the ultimate monitor* dalam kegiatan pelaporan perusahaan (Committees, 1999). Komite Audit dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris (Komaruddin, 2013). Selain memberikan masukan, menelaah terkait aktivitas manajemen terkait laporan keuangan, Komite Audit pun memastikan bahwa manajemen perusahaan sudah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya ukuran Komite Audit akan mempengaruhi keefektifan pengontrolan kegiatan manajemen, termasuk pengungkapan informasi lingkungan (Ariningtika, 2014:4). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pratitis, 2018; Sari et al., 2019; Wardani & Haryani, 2018). Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan indikator ukuran perusahaan (Abdul Kadir, 2020). Semakin besar perusahaan maka pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan pun relatif luas (Anggrarini & Taufiq, 2017). Perusahaan yang besar akan melakukan pengungkapan yang lebih luas karena memiliki risiko tinggi pada kerusakan lingkungan (Sparta & Rheadanti, 2019). Perusahaan berskala besar tidak akan lepas dari pantauan dan tekanan pemegang saham, sehingga harus memiliki keterbukaan pada publik (Syed & Butt, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggrarini & Taufiq, 2017; Dias et al., 2019; Pratitis, 2018; Sparta & Rheadanti, 2019; Sukartha, 2013; Syed & Butt, 2017). Berdasarkan penjabaran di atas maka hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Sebagai bentuk komunikasi kepada pemegang saham, calon investor, regulator, dan masyarakat terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungan, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan CSR. Keterbukaan perusahaan melalui media (*media exposure*) maupun *website* perusahaan terkait pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dapat memberikan penilaian positif. Pemberitaan yang layak mengenai perusahaan merupakan salah satu kunci dalam menambah *image* perusahaan. Hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hammami & Hendijani, 2019; Pakpahan & Rajagukguk, 2018; Rupley et al., 2012; Sparta & Rheadanti, 2019). Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Keterbukaan Massa berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari *annual report* dan *sustainability report* perusahaan pertambangan pada periode 2015-2019 atau selama 5 tahun. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah perusahaan pertambangan yang 5 (lima) tahun berturut-turut mempublikasikan *annual report* dan mempublikasikan *sustainability report* pada periode 2015-2019. Dari kriteria *purposive sampling* yang sudah ditentukan tersebut terdapat 60 sampel penelitian.

No.	IER Item	IER Index (weighed)
1	Impact of Using Water	3,25
2	Incidents and Fines	3,05
3	Programs for Protection	2,27
4	Waste by Type	1,99
5	Impacts of Activities	1,91
6	Materials by Type	1,84
7	Environmental Expense	1,63
8	Discharges Water	1,58
9	Other Air Emissions	1,54
10	Withdrawals of Ground Water	1,44
11	Land Information	1,43
12	Volume of Water Use	1,41
13	Energy Consumption	1,29
14	Performance of Supplier	1,25
15	Impact of Discharges Water	1,05
16	Impacts of Transportation	1,05
17	Impacts of Products	0,95
18	Land for Extraction	0,84
19	Spills of Chemicals	0,76
20	Indirect Energy	0,67
21	Renewable Initiatives	0,59
22	Habitat Changes	0,42
23	Other Indirect Energy	0,41
24	Recycling Water	0,37
25	Hazardous Waste	0,36
26	Impermeable Surface	0,30
27	Affected Red List Species	0,30
28	Impact of Activities on Protected Areas	0,28
29	Wastes of Material	0,20
30	Direct Energy	0,19
31	Greenhouse Gas Emissions (GGEs)	0,14
32	Recycling Materials	0,10
33	Emissions of Ozone Depleting Substances	0,08
34	Other Indirect GGEs	0,02
35	Operations in Protected Areas	0,02
	Mean	1,00

Gambar 1. Indonesian Environmental Report (IER)

Sumber: Suhardjanto & Miranti, 2010

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*) yang merupakan bentuk keterbukaan dalam pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (Suhardjanto & Miranti, 2010). Gambar 1 merupakan skor indeks Indonesia Environmental Report (IER), yang merupakan indikator pengungkapan informasi lingkungan mengacu pada penelitian Suhardjanto dan Miranti (2010). Skor tertentu akan diberi pada tiap kriteria pengungkapan kegiatan terkait lingkungan hidup berdasarkan apa yang dijelaskan dalam *sustainability report* atau *annual report* perusahaan. Bobot skor yang berbeda akan diberikan per kriteria dan kemudian dijumlahkan. Apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan informasi lingkungan akan diberi skor 0, jika mengungkapkan seluruh kriteria IER akan memperoleh total skor 34,98.

Variabel independen atau variabel bebas yang pertama adalah ukuran dewan komisaris. Semakin banyak jumlah dewan komisaris diharapkan dapat leboh efektif mengawasi apa yang dilakukan oleh manajemen. Variabel Ukuran Dewan Komisaris menggunakan jumlah Dewan Komisaris yang terdapat pada perusahaan tersebut.

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

Variabel independen atau variabel bebas yang kedua adalah ukuran komite audit. Semakin banyak jumlah Komite Audit diharapkan mampu membantu Dewan Komisaris mengawasi manajemen perusahaan. Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya harus ada 3 anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit pada penelitian ini diperoleh dengan membagi jumlah Komite Audit pada perusahaan dengan jumlah Komite Audit yang dipersyaratkan oleh OJK.

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota Komite Audit Perusahaan}}{\text{Jumlah minimal anggota komite audit sesuai peraturan OJK}}$$

Variabel independen atau variabel bebas yang ketiga adalah ukuran perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dihitung dengan rumus logaritma natural berasal dari total asset perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset})$$

Variabel independen atau variabel bebas yang kelima adalah keterbukaan massa. Keterbukaan massa menggunakan perhitungan *dummy*. Perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* pada *website* perusahaan akan diberi angka 1, sedangkan perusahaan yang tidak menerbitkan *sustainability report* akan diberikan angka 0.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data perusahaan sektor pertambangan dalam kurun waktu 5 tahun dari periode 2015-2019 yang digunakan dalam penelitian sebanyak 60 perusahaan. Ketidakkonsistenan perusahaan dalam

mempublikasikan *sustainability report* atau pengungkapan informasi lingkungan melalui *annual report* menjadi keterbatasan untuk terpilih menjadi sampel penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ukuran dewan komisaris	60	3	10	5,6	1,392473716
Ukuran komite audit	60	1	1,33	1,1155	0,158728262
Ukuran perusahaan	60	29	32	30,6333	1,073038876
Media exposure	60	0	1	0,73333	0,445948491
Pengungkapan Informasi Lingkungan	60	2,41	31,3	13,792	6,502853037
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 1 menjelaskan terkait statistik deskriptif pada penelitian ini. Variabel dependen yaitu pengungkapan informasi lingkungan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 13,79%, dan standar deviasi dibawah *mean* atau rata-rata yang berarti sampel yang digunakan untuk variabel ini dapat merepresntasikan populasi. Variabel independen ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan keterbukaan massa (*media exposure*) juga memiliki nilai standar deviasi dibawah *mean*, dimana hal ini pun menunjukkan bahwa sampel yang digunakan pada setiap variabel dependen dapat digunakan untuk merepresentasikan populasi.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, normalitas data penelitian telah diuji menggunakan uji *skewness dan Kurtosis*. Data dinyatakan lolos uji normalitas karena berada pada nilai rasio normal. Model regresi linier berganda juga sudah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel independen kurang dari 10, sehingga bebas dari multikolinearitas.

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

	Tolerance	VIF
(Constant)		
Ukuran dewan komisaris	0,93817	1,065906
Ukuran komite audit	0,91332	1,0949095
Ukuran perusahaan	0,97126	1,029595
Media exposure	0,94477	1,0584602

Sumber: Data diolah, 2021

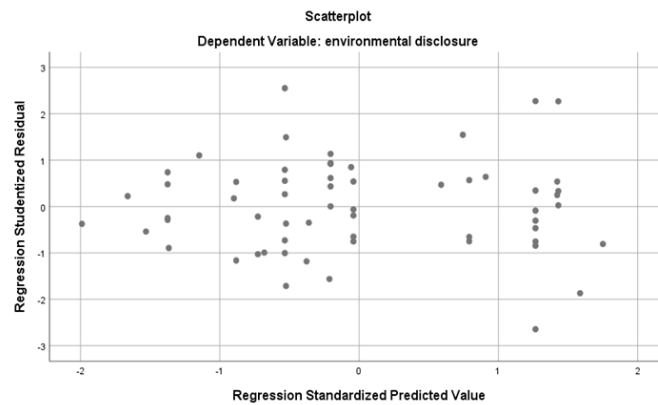
Model penelitian ini juga bebas autokorelasi, ditunjukkan dengan nilai *durbin Watson* 1,63, masih berada antara dU $1,7274 < durbin\ Watson < 2,2726$ ($4 - 1,7274$).

Tabel 3. Durbin Watson

Model Summary ^b
Durbin-Watson
1,630690806

Sumber: Data diolah, 2021

Data penelitian bebas dari heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan pola gambar *scatterplot* seperti ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan pola gambar *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah nilai 0, tidak berpola ataupun membentuk pola bergelombang melebar atau menyempit.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.534 ^a	0,28503	0,233031	5,694990009

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4 nilai *adjusted*R² sebesar 0,233032. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen, yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, dan keterbukaan massa hanya mempengaruhi variabel pengungkapan informasi lingkungan sebesar 23,3%. Sedangkan 76,7% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian ini.

Tabel 5. Uji t

	Unstand-ardized Coefficients	Std. Error	Standard-ized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	11,107	21,8209		0,509005325	0,61278
Ukuran dewan komisaris	-0,5409	0,54972	-0,115829	-0,98400121	0,32942
Ukurankomite audit	18,8442	4,88767	0,459968	3,855455959	0,0003
Ukuran perusahaan	-0,5696	0,70111	-0,093992	-0,8124492	0,42004
Media exposure	2,92185	1,71049	0,200373	1,708198053	0,09324

Sumber: Data diolah, 2021

Dalam penelitian ini nilai signifikan yang digunakan untuk uji t adalah 0,05 apabila nilai uji sig. >0,05 artinya tidak adanya pengaruh signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki nilai T_{tabel} sebesar 2,00404. Jika T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel 5 variabel Dewan Komisaris memiliki nilai T_{tabel} sebesar -0,984, lebih kecil dari T_{hitung} 2,00404. Nilai signifikansi untuk variabel Dewan Komisaris sebesar 0,32942 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi lingkungan, sehingga hipotesis pertama (H₁) ditolak. Teori *stakeholder* tidak terdukung pada penelitian ini. Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam menentukan pengungkapan informasi lingkungan melalui *sustainability report* oleh manajemen (Suprpti et al., 2019). Dewan Komisaris hanya berfokus pada memberikan masukan kepada direksi.

Selain itu masih terdapat pro dan kontra dalam pengungkapan informasi lingkungan sebagai implementasi undang-undang Perseroan Terbatas, sehingga kurang menjadi perhatian Dewan Komisaris

(Wardani & Haryani, 2018). Hasil penelitian ini menunjang penelitian yang dilakukan oleh Anggrarini & Taufiq (2017); Suprapti et al. (2019); Wardani & Haryani(2018) Variabel independen kedua, Ukuran Komite Audit memiliki T_{hitung} sebesar 3,8554 lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,0040. Nilai signifikasin variabel ini sebesar 0,0003, lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan, sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung *agency theory*, dimana komite audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan, termasuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Komite Audit memastikan bahwa manajemen telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan, melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan wajar, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Peranan Komite Audit sangat diharapkan oleh *stakeholder* untuk memastikan perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Artinya, jumlah komite audit dalam suatu perusahaan mampu mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Hasil penelitian ini menunjang penelitian yang dilakukan oleh, Appuhami & Tashakor, (2017) ; Kurniawan, (2019); G. A. C. N. Sari et al., (2019); Suprapti et al., (2019).

Variabel independen ketiga, ukuran perusahaan memiliki nilai T_{hitung} sebesar -0,81244 lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 2,0040. Nilai signifikansi variabel ini sebesar 0,42004 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hasil penelitian ini untuk variabel ukuran perusahaan tidak mendukung teori agensi, dimana berdasarkan teori agensi bahwa perusahaan besar akan mempunyai biaya agensi (*agency cost*) yang besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Artinya perusahaan besar akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengungkapkan informasi terkait kondisi perusahaannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori *stakeholder* dimana untuk ukuran perusahaan yang besar memiliki risiko yang besar pula dibanding perusahaan kecil, sehingga manajemen harus mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan *stakeholder* untuk keputusan berinvestasi. Hal ini tergambar dari sample yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya PT. Indika Energy Tbk. yang memiliki jumlah asset sebesar lebih kurang Rp 50 Triliun, tetapi hanya melakukan pengungkapan informasi lingkungan sebanyak 6 item IER. PT Bukit Asam Tbk yang memiliki asset sebesar lebih kurang Rp 16 Triliun mengungkapkan 29 item IER. Penelitian ini menunjang hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakpahan & Rajagukguk (2018).

Variabel Independensi keempat, yaitu keterbukaan massa memiliki T_{hitung} sebesar 1,708198 lebih kecil dari nilai T_{tabel} sebesar 2,0040. Nilai signifikansi variabel ini sebesar 0,09324 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel keterbukaan massa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan, sehingga hipotesis keempat (H_4) ditolak. Dalam penelitian ini perusahaan-perusahaan sampel masih kurang konsisten dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Berdasarkan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa kepedulian perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan secara khusus melalui *sustainability report* masih rendah. Perusahaan hanya mengungkapkan kegiatan sosial sebagai bentuk CSR melalui *annual report*, walaupun CSR sendiri terbagi tiga yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi. Selain itu tidak jelasnya *punishment* Pemerintah terhadap rendahnya implementasi regulasi pengungkapan informasi lingkungan menyebabkan ketidakkonsistenan perusahaan menerbitkan *sustainability report* setiap tahun. Hasil penelitian ini menunjang penelitian yang telah dilakukan oleh Pratitis, (2018); Solikhah & Winarsih, (2016); Sukartha, (2013).

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil olah data mendukung hipotesis kedua, yaitu ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Hipotesis ini sesuai teori agensi. Peranan Komite Audit sangat diharapkan oleh *stakeholder* untuk memastikan perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Jumlah Komite Audit yang lebih banyak menyakinkan *stakeholder* bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi oleh manajemen, termasuk pengungkapan informasi lingkungan. Variabel independen lainnya, yaitu ukuran dewan komisaris perusahaan, ukuran perusahaan, dan keterbukaan massa tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Sedikitnya sampel yang didapatkan merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena ketidakkonsistenan perusahaan mengungkapkan informasi lingkungan melalui *sustainability report*

setiap tahunnya, sehingga data tidak dapat diambil sebagai sampel. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel kontrol dalam menguji hipotesis, sehingga pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen lebih tergambar baik. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan selain sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, D. G. Y. A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Manajemen Dan Akuntansi*, 21(April).
- Ahmad, N. N. N., & Sulaiman, M. (2004). Environmental disclosures in Malaysian annual reports: A legitimacy theory perspective. *International Journal of Commerce and Management*, 14(1), 44-58. <https://doi.org/10.1108/10569210480000173>
- Anggrarini, D., & Taufiq, E. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 18(2), 119-126.
- Appuhami, R., & Tashakor, S. (2017). The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure: An Analysis of Australian Firms. *Australian Accounting Review*, 27(4), 400-420. <https://doi.org/10.1111/auar.12170>
- Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information - A dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 29(1), 21-41. <https://doi.org/10.1080/00014788.1998.9729564>
- Committees, B. R. C. on I. the E. of C. A. (1999). Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. *The Business Lawyer*, 54(3). <http://www.jstor.org/stable/40687877>
- Cowen, S. S., Ferreri, L. B., & Parker, L. D. (1987). The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 12(2), 111-122. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(87\)90001-8](https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90001-8)
- Dharmawan Krisna, A., & Suhardianto, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 119-127. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>
- Dias, A., Rodrigues, L. L., Craig, R., & Neves, M. E. (2019). Corporate social responsibility disclosure in small and medium-sized entities and large companies. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 137-154. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2017-0090>
- Dowling J, P. J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Hammami, A., & Hendijani Zadeh, M. (2019). Audit quality, media coverage, environmental, social, and governance disclosure and firm investment efficiency: Evidence from Canada. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(1), 45-72. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2019-0041>
- Komaruddin, I. S. L. (2013). Hubungan Antara Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Pada Perusahaan Mamufaktur di BEI). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 4(Maret), 63-81. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Kurniawan, I. S. (2019). Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas , Dan Leverage Perusahaan Terhadap Environmental Disclosure. *Jurnal FEB Unmul*, 21(2), 165-171. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Mutia, K. F., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2018). *Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Sri Kehati Periode 2013-2017*. 1, 13-25.
- Pakpahan, Y., & Rajagukguk, L. (2018). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi*, 18(2). <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/Akun/article/view/1631>
- Pratitis, A. W. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Saham Publik Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2. *Naskah Publikasi*.
- Rokhlinasari, S. (2015). *Teori -Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Rupley, K. H., Brown, D., & Marshall, R. S. (2012). Governance, media and the quality of environmental disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(6), 610–640. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.09.002>
- Sari, G. A. C. N., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Environmental Disclosure (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Terdaftar di PROPER Ta. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(1), 145–155. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/16959/10156>
- Sari, W., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(3), 18–14.
- Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan (The Effect Of Media Coverage, Industry Sensitivity And Corporate Governance Structure On Environmental Disclosure Quality). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 1–22.
- Sparta, D., & Rheadanti, D. K. (2019). Pengaruh Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. *Equity*, 22(1), 12. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i1.903>
- Suhardjanto, D., & Miranti, L. (2010). Indonesian Environmental Reporting Index. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(1), 63–67.
- Sukartha, R. A. H. I. M. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Eksposur Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Suprpti, E., Fajari, F. A., & Anwar, A. S. H. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure. *Akuntabilitas*, 12(2), 215–226. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.13225>
- Syed, M. A., & Butt, S. A. (2017). Financial and non-financial determinants of corporate social responsibility: Empirical evidence from Pakistan. *Social Responsibility Journal*, 13(4), 780–797. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2016-0146>
- theconversation.com. (2020). *Lemahnya regulasi minerba berpotensi tingkatkan angka korban tenggelam di lubang bekas tambang*. <https://theconversation.com/lemahnya-regulasi-minerba-berpotensi-tingkatkan-angka-korban-tenggelam-di-lubang-bekas-tambang-141487>
- Wardani, D. K., & Haryani, S. (2018). Dampak Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Lingkungan. *Jrak*, 14(2), 67–82.